



Kades Masih Takut Kelola ADD



Bali Post/kmb28

I Wayan Arimbawa

Tabanan (Bali Post) -

Di balik kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup besar, ternyata ada risiko yang harus ditanggung oleh para perbekel. Mereka harus mampu membuat perencanaan program termasuk pertanggungjawabannya dengan benar, jika tidak mau berurusan dengan hukum. Mencegah hal tersebut, bagian keuangan Pemkab Tabanan melakukan pendampingan ke desa khususnya dalam pembuatan program rencana pembangunan.

"Kenyataan di lapangan masih banyak kepala desa (kades) takut salah kelola anggaran," papar Kabag Keuangan Pemkab Tabanan I Wayan Arimbawa, Senin

(10/8) kemarin. Kendala lain yang masih menghantui pengelolaan anggaran dari pusat tersebut adalah lemahnya pemahaman tentang aturan, SDM yang belum memadai, sarana dan prasarana gedung kantor desa yang kurang representatif khususnya untuk penempatan komputer, serta belum terealisasinya tenaga pendamping dari pemerintah pusat meski sudah dirapatkan secara nasional.

Mengatasi masalah yang masih ditemukan di lapangan, pihaknya berinisiatif melakukan pembinaan tiap hari ke desa-desa. Apalagi Tabanan ingin dijadikan proyek percontohan oleh BPK. "Kami fokuskan memantapkan di wilayah Kecamatan Tabanan. Pembinaan ini dilakukan di luar jam kerja," ucapnya.

Terkait pengelolaan keuangan, Arimbawa mengakui jika daerah lain seperti Denpasar terkadang juga belajar dari Tabanan. Untuk itu, pihaknya terus melakukan bimtek dan pelatihan, bahkan siap membantu 24 jam. Dalam membuat laporan, ia minta jangan langsung ditandatangani, ada baiknya dikonsultasikan dulu.

Dihubungi terpisah, Ketua Forum Perbekel Tabanan Made Arya mengakui masih sangat diperlukan adanya pendampingan terutama dari keuangan dan inspektorat. "Terkait UU Desa ini masih perlu dipelajari, karena banyaknya aturan," ujar Arimbawa. (kmb28)

Edisi : Selasa, 11 Agustus 2015

Hal : 14



Kasus GOR Nusa Penida

Dua Kali

Semarapura (Bali Post) –

Upaya Kejaksaan Negeri Klungkung membongkar adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan proyek GOR Nusa Penida ditanggapi dingin oleh mantan Camat setempat Made Sudiarkajaya. Selaku penanggung jawab proyek tersebut, Sudiarkajaya yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Perizinan Klungkung mengaku sudah sempat diperiksa dua kali oleh pihak kejaksaan. Hanya, status pemanggilan dirinya baru sebatas saksi terkait proyek yang telah menelan dana sekitar Rp 2,2 miliar tersebut.

“Baru dua kali saya dipang-

gil sebagai saksi dan sampai saat ini belum menerima surat pemanggilan lagi,” ujar Sudiarkajaya ditemui sesuai menghadiri acara pelantikan sekda di ruang Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Senin (10/8) kemarin. Menurut dia, proyek GOR Nusa Penida lebih detailnya ditangani oleh panitia yang berisikan ketua, sekretaris, dan bendahara. Sudiarkajaya yang saat itu sebagai camat sudah mendapati perencanaan pembangunan GOR, sehingga proyek tersebut dilaksanakan. Ketua panitia dijabat mantan Kepala UPT Disdikpora Nusa Penida Ketut Wiadnya, sekre-

taris dipegang Dewa Suamba, serta posisi bendahara dipangku Kepala SMKN Nusa Penida dan Sekretaris Camat Nusa Penida saat itu.

Sudiarkajaya tidak menampik pembangunan GOR Nusa Penida dianggarkan dari pusat, Pemprov Bali, dan APBD Klungkung. Pusat awalnya mengucurkan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar, Provinsi Bali 200 juta, sedangkan APBD Klungkung mengucurkan dana dua kali masing-masing Rp 500 juta dan Rp 600 juta. Proyek dirancang tidak sampai *finishing*.

Selain itu, Sudiarkajaya juga membantah kalau pembangunan



Made Sudiarkajaya

GOR Nusa Penida mangkrak. Tribun GOR sempat dipakai acara Kemerdekaan RI pada 2010 silam, serta kejuaraan bola voli dan Fesifal Nusa Penida tahun lalu. Akan tetapi diakuinya proyek GOR Nusa Penida dikerjakan secara swakelola.

Sebagai penanggung jawab, Sudiarkajaya mendukung langkah pihak kejaksaan menghitung ulang proyek tersebut, sehingga tidak menimbulkan keraguan berapa besar biaya yang dihabiskan. “Berapa besar menghabiskan anggaran, saya tidak tahu. Semua itu sudah saya sampaikan ketika diperiksa,” tegasnya. (kmb)

Edisi : Selasa, 11 Agustus 2015

Hal : 10



Korupsi Bansos

Kejari Tahan Tersangka

Kasus UPPO Batur

Bangli (Bali Post) -

Setelah cukup lama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bansos pengembangan unit pengolahan pupuk organik (UPPO), Ketua Kelompok Tani Bina Winangun, Banjar Taksu Tengah, Batur, Kintamani I Nyoman Juniada, akhirnya ditahan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli, Senin (10/8) sore. Penahanan terhadap tersangka dilakukan setelah semua berkas penyidikannya dinyatakan rampung.

Kajari Bangli Ida Ayu Retnasari didampingi Kasi Pidsus Bagus Putra saat ditemui sore kemarin mengatakan, penahanan terhadap tersangka dilakukan setelah berkas penyidikan yang diserahkan penyidik Polres Bangli lengkap. Tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bangli. Dijelaskan, tersangka ditahan lantaran kasus dugaan korupsi yang membelitnya.

Tersangka diduga melakukan penyalahgunaan dana bansos pengembangan UPPO dari Dirjen Sarana Prasarana Kementerian Pertanian 2012 yang diterima Kelompok Tani Bina Winangun di Banjar Taksu, Desa Batur. Sesuai petunjuk, bantuan senilai Rp 340 juta harusnya dipergunakan untuk beberapa pengadaan. Tetapi dalam pengelolaannya, dana tersebut ternyata melenceng dari rencana usulan kegiatan kelompok. "Dana tersebut seharusnya

dipergunakan untuk pengolahan pupuk. Tetapi tidak semuanya dipergunakan bahkan ada yang dipergunakan untuk membayar kredit sendiri," terang Kasipidsus.

Selain itu sejumlah uang bansos tersebut juga ada yang dipergunakan untuk membayar tenaga buruh dan membuat sekretariat kelompok. Akan tetapi, hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, lantaran tidak ada bukti kuitansi maupun pendukung lainnya. Tersangka, ungkap Kasipidsus, selama ini mengelola uang tersebut sendirian. Padahal saat pengajuan menggunakan nama kelompok. "Tersangka menggunakan uang itu tanpa sepengetahuan kelompok," jelasnya.

Sesuai perhitungan yang dilakukan BPKP total kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 340 juta. Atas perbuatannya itu



Bali Post/ina

TERSANGKA - Tersangka I Nyoman Juniada saat dibawa menuju Rutan Bangli.

tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU No. 20/2001 tentang Perubahan UU 39/1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Oleh pihak Kejari, kasus tersebut rencananya akan segera diimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Denpasar dalam waktu dekat

ini.

Sementara itu, sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, dalam kasus korupsi ini, mantan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan (P3) Bangli berinisial WS juga ikut terseret. Pejabat yang kini masih

aktif di Pemkab Bangli tersebut bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Tipikor Polres Bangli sejak beberapa bulan lalu. Dia ditetapkan sebagai tersangka lantaran berperan besar hingga menciptakan kerugian negara. (kmb40)



Bali Post



PPAS Tahun 2016

Komisi III Minta Belanja Modal Dinaikkan

Gianyar (Bali Post) -

Belanja daerah Kabupaten Gianyar dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016 dirancang Rp 1.532.546.253.965 atau naik 6,05 persen dari APBD 2015 yang sebesar Rp 1.445.120.498.815. Meski secara umum dirancang naik, terdapat sejumlah pos belanja yang justru menurun. Salah satunya belanja modal. Komisi III DPRD Gianyar pun mendesak pemerintah menaikkan rancangan belanja modal lantaran hal tersebut bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Pada PPAS 2016 yang sedang dibahas di DPRD Gianyar, pada pos belanja tidak langsung, belanja hibah pada Plafon Anggaran Sementara tahun 2016 dirancang turun sebesar Rp 887.760.000 atau 3,94 persen menjadi Rp 21.626.949.500 dari APBD induk 2015 yang sebesar Rp 22.514.709.500. Bansos dirancang Rp 4.186.130.000. Jumlah ini turun Rp 987.500.000 atau 19,09 persen dari APBD

induk 2015 yang sebesar Rp 5.173.630.000.

Pada pos belanja tidak langsung, alokasi terbesar adalah untuk belanja pegawai. Jika pada APBD induk 2015 dipasang Rp 881.083.049.670, maka pada PPAS 2016 dirancang naik 5,1 persen menjadi Rp 883.350.786.398

Sedangkan pada pos belanja langsung, pada APBD 2015 dirancang Rp 451.653.888.694.

Pada PPAS 2016 dirancang naik 9,96 persen menjadi Rp 496.550.403.471. Menariknya, salah satu elemen belanja langsung yakni belanja modal justru dirancang turun. Pada PPAS 2016 dirancang Rp 187.092.456.237. Angka ini turun sebesar Rp 4.189.513.171 atau 2,19 persen dari APBD induk 2015.

Diminta konfirmasi mengenai hal ini, Ketua Komisi III DPRD Gianyar

A.A. Gede Agung Wiraman-tara, Senin (10/8) kemarin, mengungkapkan, pihaknya tidak begitu mempersoalkan turunnya alokasi dana bansos dan hibah pada KUA-PPAS tahun 2016. "Kalau hibah dan bansos kami tidak terlalu mempersoalkan karena adanya aturan baru," katanya.

Yang menjadi persoalan justru pada pos belanja modal. Dia berpendapat, belanja modal merupakan alokasi anggaran yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Seharusnya tiap tahun belanja modal ditingkatkan, bukan justru turun. "Tadi (kemarin, red) kami sudah bahas di rapat kerja anggaran dengan Dispenda, Bagian Keuangan dan Asisten

III. Kita minta selaraskan khususnya untuk belanja modal. Karena bansos terbelunggu undang-undang, kita harus tingkatkan kegiatan untuk pembangunan melalui belanja modal. Supaya APBD Gianyar benar-benar pro-rakyat," tegasnya.

Komisi III, kata dia, telah meminta eksekutif untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) agar alokasi anggaran untuk belanja modal bisa ditingkatkan. Sesuai kesepakatan pada RKA kemarin, PAD diharapkan dirancang menjadi Rp 425 miliar. "Dengan naiknya ini, kami minta naikkan belanja modal karena itu menyangkut masalah infrastruktur," katanya. (kmb25)

Edisi : Selasa, 11 Agustus 2015

Hal : 9